

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KETAHANAN KELUARGA
DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK
(STUDI KASUS DI PADUKUHAN AMBARUKMO DESA CATURTUNGAL
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MOHAMAD TAJANG MS
12350026

PEMBIMBING:
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PRODI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Salah satu komponen ketahanan keluarga adalah ketahanan ekonomi keluarga yang terdiri dari: a. pendapatan keluarga yang memadai; b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan; dan c. jaminan keuangan keluarga. Namun tidak semua anak mampu menyelesaikan jenjang pendidikan (putus sekolah) dalam mewujudkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak di Padukuhan Ambarukmo Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tidak sepenuhnya mampu melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana kewajiban orang tua dalam menjamin layanan pendidikan baik ditinjau dari konsep ketahanan keluarga maupun tinjauan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-yuridis. Metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun yaitu dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki dua jalur dalam mendidik, membina, membimbing, dan memberikan pendidikan terhadap anak. Pertama Taman Pendidikan Al-Quran (TPA). Jalur kedua pendidikan pada institusi sekolah. Sekolah dinilai memiliki sarana yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan anak terhadap ilmu pengetahuan dan penunjang lainnya dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Berbeda dengan pendidikan TPA yang cenderung tidak memiliki jenjang tingkat pendidikan, pada jalur ini faktor biaya terkadang menjadi kendala yang sering dihadapi oleh keluarga, sehingga tidak semua anak mampu menyelesaikan jenjang pendidikan mewujudkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Kata kunci: Ketahanan Keluarga, Hak Pendidikan Anak, Hukum Islam, Padukuhan Ambarukmo



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Tajang MS

NIM : 12350026

Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Studi Kasus Di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)**

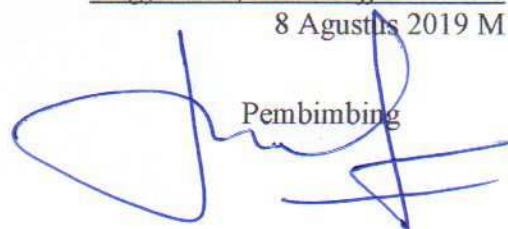
Sudah dapat diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 7 Dzulhijjah 1440 H

8 Agustus 2019 M



Pembimbing

Dr. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP: 19660801 199303 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Mohamad Tajang MS
2. NIM : 12350026
3. Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
4. Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Dzulqa'dah 1440 H
Tanggal 20 Juli 2019 M

Yang menyatakan

Monamad Tajang MS



12350026



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-399/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KETAHANAN KELUARGA
DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK (STUDI KASUS DI
PADUKUHAN AMBARUKMO DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD TAJANG MS
Nomor Induk Mahasiswa : 12350026
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 19 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

إن مع العسر يسرا

Sesungguhnya

sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Al-Insyirah (94):06)

PERSEMBAHAN

- **Skripsi ini saya persembahkan kepada Kedua orang tuaku Mantang (mama) dan Muhidding (papa), terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan doa yang diberikan kepada saya.**
- **Kepada saudara dan saudariku, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya.**
- **Kepada teman-teman (teman dekat ataupun yang jauh) yang tidak bisa disebut nama satu persatu.**
- **Almamater SDN 1 Puntari Makmur Morowali.**
- **Almamater Pondok Pesantren Nurul Ummah Morowali.**
- **Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	‘illah

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	zakatul fiṭri
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fatḥah + ya' mati	ditulis	ā
تنسى	ditulis	tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

VI. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fatḥah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	'u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي القروض	ditulis	Zawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا
الله و أشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلى آله و
أصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Karena dengan taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita nabi Allah
Muhammad SAW yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai
saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia. Semoga kita semua
termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir
kelak.

Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan
Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul skripsi ini .“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola
Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Studi Kasus di
Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Yogyakarta)”.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program, beserta sekretaris program, staf dan dosen Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta;
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) .
Terimah kasih atas segala ilmu, motivasi, nasehat, dan bantuan yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir hingga penyelesaian penulisan skripsi ini
6. Kedua orang tua penyusun Mantang (mama) dan Muhidding (papa) yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi,

nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa terbalaskan.

7. Kelima kakak Hamsah MS, Marding MS, Marliya, S.Pd., Zainuddin MS, S.Com., Marming S.KM. dan kedua adik penyusun alm. Reski, serta Umar MS. terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta doanya. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa.
8. Semua pihak yang telah berjasa membantu penyusun skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Akhirul kalam, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunanpenyusunan berikutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Amin.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1440 H
2 Agustus 2019 M

Penyusun

Mohamad Tajang MS
NIM: 12350026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teoretik.....	15
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HADHANAH, POLA	
KETAHANAN KELUARGA DAN HAK PENDIDIKAN ANAK	28
A. Hadhanah	28
B. Ketahanan Keluarga.....	33
C. Hak Pendidikan Anak	42
 BAB III : PRAKTEK PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DI	
PADUKUHAN AMBARUKMO, DESA CATURTUNGGAL,	
KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN,	
YOGYAKARTA.....	52
A. Gambaran Umum Wilayah di Padukuhan Ambarukmo	52
1. Letak dan Keadaan Geografis	52
2. Kondisi Demografis	53
3. Kondisi Sosial	56
4. Kondisi Sosial Agama.....	57
5. Kondisi Pendidikan	58
B. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pada Obyek Peneltian	59
1. Keluarga Bapak Yayan	59
2. Keluarga Bapak Wintoro.....	63
3. Keluarga Bapak Santoso	65
4. Keluarga Ibu Sri	67
5. Keluarga Bapak Slamet.....	69

BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN POLA KETAHANAN	
KELUARGA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN	
ANAK DI PADUKUHAN AMBARUKMO, DESA	
CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN	
SLEMAN, YOGYAKARTA.....	71
A. Analisis Terhadap Keluarga Yayan	72
B. Analisis Terhadap Keluarga Wintoro	76
C. Analisis Terhadap Keluarga Santoso	81
D. Analisis Terhadap Keluarga Sri	86
E. Analisis Terhadap Keluarga Slamet	92
 BAB V : PENUTUP	 96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	99
 DAFTAR PUSTAKA	 100
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 I
Lampiran 1 Terjemahan	I
Lampiran 2 Surat Izin Riset	II
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	III
Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara	IV
Lampiran 5 Riwayat Hidup Penyusun	V

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Klasifikasi Batas Usia Anak Menurut Undang-Undang	45
2. Tabel 3.1 Batas-batas Wilayah Desa Caturtunggal, Depok, Sleman ...	52
3. Tabel 3.2 Batas-batas Wilayah Padukuhan Ambarukmo	53
4. Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Umur	54
5. Tabel 3.4 Jumlah Kepala Keluarga	54
6. Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Nikah	55
7. Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Agama	55
8. Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan	56
9. Tabel 3.8 Sarana Pendidikan Kelurahan Caturtunggal	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil yang menjadi pertahanan utama untuk dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya sinteraksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.¹

Ketahanan keluarga diartikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri individu dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.² Lebih lanjut disebutkan bahwa memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan

¹ Anisah Cahyaningtyas, dkk. *Pengembangan ketahanan keluarga* 2016, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), hlm. 5.

² Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

meningkatkan kualitas hidupnya adalah bagian dari hak³ setiap penduduk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Dalam Al-Qur'an menyebutkan mengenai membangun rumah tangga hingga menghasilkan keturunan dan mendidiknya.

والذين لا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما⁴

Setidaknya terdapat empat poin dalam membangun rumah tangga, yaitu: Pasangan, Keturunan, Penggembira, Kepemimpinan.

Salah satu aspek Ketahanan keluarga⁵ adalah ketahanan dibidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri, orang tua dan anak-anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

Indonesia menaruh perhatian terhadap hak-hak anak dimulai pada tahun 1979, dengan lahirnya UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

³ Pasal 5b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

⁴ Surat Al-Furqaan (25):74

⁵ Rizqi Maulida Amalia,dkk. Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian, *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2, September 2017.hlm. 130.

Anak. Dalam UU tersebut (Bab II Pasal 2) ditegaskan adanya 4 kelompok hak anak, yaitu: pertama, Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; kedua, Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna; ketiga, Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; Keempat, Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Hak anak termasuk hak mendapatkan pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia,⁶ yang wajib dijamin dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam studi ini, yang dimaksudkan dengan hak anak adalah segala sesuatu yang mesti diterima anak, yang merupakan kewajiban bagi kedua orang tuanya, bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh orangtuanya, dan upaya-upaya yang dilakukan terhadap anak untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya.

⁶ Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mempunyai pengertian yang sama antara ketahanan keluarga dengan kesejahteraan keluarga, sehingga suatu keluarga akan memiliki ketahanan, apabila kesejahteraan keluarga terpenuhi. Lebih lanjut mengenai ketahanan keluarga telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, bahwa keluarga memiliki tanggung jawab dalam membangun dan menjaga ketahanan keluarga. Salah satu tanggung jawab keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan.

Dalam pendidikan keluarga orang tua memposisikan diri sebagai pendidik sejati. Sebab pendidikan dimulai dengan berbagai tingkah laku dan perbuatan orangtua yang akan menjadi acuan bagi anak-anaknya/ keteladanan yang diberikan orang tua. Keteladanan bukan hanya memberikan pemahaman secara verbal, tetapi memberikan contoh secara langsung. Karena manusia pada fase anak-anak senang meniru sesuatu yang dilihatnya. Oleh karena itu, orangtua hendaknya memberikan bimbingan dan asuhan serta tauladan yang baik terhadap anak-anaknya.

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang informal karena tidak memiliki program yang jelas dan resmi, oleh sebab itu pada tahapan selanjutnya orang tua dapat mengarahkan anak pada berbagai institusi

pendidikan formal agar anaknya bisa mendapat pendidikan yang lebih luas dan dapat memperluas pengetahuan dari berbagai sumber. Walaupun tugas mendidik anak dilimpahkan kepada guru di sekolah, akan tetapi tugas guru itu hanya sebatas membantu orang tua dan bukan mengambil alih tanggung jawab orang tua secara penuh.

Di Padukuhan Ambarukmo yang berada dalam wilayah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, orang tua setidaknya memiliki dua jalur dalam membina, membimbing dan memberikan pendidikan terhadap anak sebagai bagian dari tanggung jawab hadanah terhadap anak. Jalur yang ditempuh yakni pendidikan TPA dan pendidikan pada institusi sekolah.⁷

TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) biasanya diselenggarakan di masjid terdekat. Materi yang diajarkan kepada santri TPA adalah belajar membaca Al-quran dengan menggunakan buku iqro' jilid 1-6. Buku-buku iqro' merupakan tahapan awal untuk melangkah pada jenjang membaca Al-Quran. Bila santri telah menyelesaikan jilid 6 dengan baik, dapat dipastikan ia dapat membaca Alquran dengan benar. Hafalan bacaan salat dan praktiknya, hafalan doa sehari-hari, hafalan surat-surat pendek, hafalan kalimat thoyibah, bermain cerita, ibadah, aqidah dan akhlak. Pelaksanaan pembelajaran di

⁷ Observasi pemenuhan hak pendidikan anak di Padukuhan Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta pada 20 Juni 2019

Taman pendidikan Alquran dilaksanakan tiap hari setelah pulang sekolah yakni setelah shalat ashar sekitar jam 16.00.

Pada jalur institusi sekolah faktor biaya terkadang menjadi kendala yang sering dihadapi oleh keluarga⁸ sehingga tidak semua anak mampu menyelesaikan jenjang pendidikan (putus sekolah) dalam mewujudkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.⁹ Padahal Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Satu komponen ketahanan keluarga adalah ketahanan ekonomi keluarga yang terdiri dari:¹⁰ pendapatan Keluarga yang memadai, pembiayaan yang memadai untuk pendidikan, dan jaminan keuangan Keluarga. Jika hal ini terjadi maka keluarga dan negara telah melakukan pembiaran sehingga hak anak menjadi kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan.

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka anak yang tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan cukup

⁸ Wawancara dengan Parlan, Kepala Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta pada 28 Juni 2019

⁹ Pasal 3h Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya

¹⁰ Pasal 15 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga

menjadi mudah dipengaruhi oleh kebiasaan buruk orang lain. Ia akan menerima apa saja yang ia dapatkan pada saat itu, jika anak sudah tidak memiliki tujuan hidup hal ini sangat berpengaruh kelak kepada pola pikirnya. Bagi anak yang putus sekolah, dapat berdampak kepada tujuan hidup di masa yang akan datang.

Anak yang putus sekolah akan berakibat menjadi tenaga yang tidak terampil dan memiliki wawasan yang sempit karena sekolah sejatinya membantu anak-anak memperoleh pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dimasa yang akan datang. Seorang anak yang mudah dipengaruhi hal-hal bersifat negatif dan yang lebih buruk dapat berbuat kejahatan, tentunya tidak hanya merugikan anak saja tetapi bagi keluarga dan lingkungan masyarakat.¹¹

Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat atau bahkan pemerintah. Pendidikan di Sekolah sebagai pembentuk kelanjutan pendidikan dalam keluarga, sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Kondisi lingkungan yang dihadapi anak putus sekolah akan berdampak pada kondisi lingkungan keluarga yang kurang harmonis.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa masyarakat di Padukuhan Ambarukmo Desa Caturtunggal Depok Sleman tidak sepenuhnya mampu

¹¹ Wawancara dengan Parlan, Kepala Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta pada 28 Juni 2019

melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana kewajiban orang tua dalam menjamin layanan pendidikan anak. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji pembahasan yakni seputar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (studi kasus di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta).”

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, maka penyusun menemukan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pola ketahanan keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pola ketahanan keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan disusunnya karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pola ketahanan keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pola ketahanan keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melihat tujuan dari penelitian ini maka diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum khususnya Hukum Keluarga Islam, mengenai tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga
 - b. Memperkaya keilmuan pada program pendidikan Hukum Keluarga Islam, mengenai tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk melakukan penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan, mengkaji terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti dan yang berhubungan dengan penelitian penulis. Penelitian literatur ini bertujuan untuk membuktikan keaslian penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang telah membahas mengenai pola ketahanan keluarga yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memperdalam hasil yang belum ditemukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan penelitian lanjutan diantaranya sebagai berikut:

Skripsi karya Nurul Amaliah¹² yang berjudul “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan di bawah Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesulitan akses pendidikan di kalangan anak perempuan berdampak pada pernikahan anak. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun hanya 5,8% menyelesaikan pendidikan SMA. Data ini menunjukkan juga bahwa mayoritas dari perempuan yang menikah di usia anak memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sebagian besar hanya menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui lembaga pendidikan belum mengakomodir hak anak yang telah menikah muda, baik karena paksaan orang tua maupun akibat pergaulan seks yang tidak aman. Kebanyakan mereka yang sudah menikah tidak lagi melanjutkan pendidikannya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengenai kesadaran dalam keluarga dalam memberikan hak pendidikan bagi anaknya hingga mampu menuntaskan pendidikan dasar. Selain itu lokasi penelitian yang dipilih juga berbeda dengan struktur sosial masyarakat yang berbeda pula.

¹² Nurul Amaliah, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)”, skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Karya Ayu Nur Rahmawati¹³ dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī’ah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Beberapa Keluarga Di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)”. Skripsi tersebut meneliti mengenai fenomena kenakalan remaja yang terjadi di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hasil penelitian di lapangan, didapatkan pola ketahanan keluarga (dengan menerapkan fungsi keagamaan, budaya, kecintaan, melindungi, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi dan pemeliharaan lingkungan) keluarga sebagai lembaga yang *fundamental* dalam masyarakat harus memiliki pemahaman tentang ketahanan kehidupan keluarga agar terwujud keluarga yang baik, melahirkan generasi yang baik dan memberi manfaat kebaikan kepada agama, masyarakat serta bangsa. Hal tersebut dapat tercipta dengan menerapkan suatu pola ketahanan yang akan mempengaruhi seluruh sikap anggota keluarga khususnya diri anak remaja dalam keluarga tersebut, sehingga timbulnya kenakalan maupun tidak terjadi kenakalan bergantung pada pola ketahanan keluarga yang diterapkan. Perbedaan dengan karya tulis yang disusun penulis adalah terletak pada pembahasan seputar pemenuhan

¹³ Ayu Nur Rahmawati, “Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī’ah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Beberapa Keluarga Di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)”, skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012

hak pendidikan anak, sedangkan karya Ayu Nur Rahmawati, lebih mengarah upaya pencegahan kenakalan remaja.

Imran Siswadi¹⁴ melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”. Dalam penjelasannya bahwa hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai larangan kekerasan terhadap anak karena tidak sesuai dengan kemanusiaan maupun ajaran agama. Bentuk “kekerasan” yang bertujuan mendidik anak dapat ditoleransi selama tidak mempengaruhi fisik dan mental. Perbedaan dengan karya penulis adalah mengaitkan Hukum Islam dalam pola ketahanan keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Selain itu penulis memiliki populasi dan sampel uji dalam penelitian ini yakni di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Skripsi karya Ahmad Rosyadi¹⁵ “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Pespektif Hukum Islam dan Positif”. Faktor penyebab anak terlantar, a. faktor keluarga; b.pendidikan; c. sosial, politik dan ekonomi; d. kelahiran diluar pernikahan; e. ketidakpekaan keluarga terhadap tumbuh kembang anak. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam hukum orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh mendidik, memelihara dan menumbuh

¹⁴ Imran Siswadi, 2011, Perlindunagn Anak Dalam Perspektik Hukum Islam dan HAM, *Al-Mawarid*, Volume XI,Nomor 2 September, 2011

¹⁵ Ahmad Rosyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Nak Terlantar Dalam Pespektif Hukum Islam dan Positif, skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016

kembangkan anak sesuai dengan kemampuan. Perbedaan dengan karya penulis adalah ruang lingkup yang dikaji yakni seputar pendidikan anak dalam keluarga yakni di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Magdalena Heldiyana Ana Lalo¹⁶ dalam karyanya berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Putus Sekolah Atas Pendidikan”. Pendidikan membantu mempelancarkan pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia dan sebagai hak asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Pemerintah untuk merealisasikan pendidikan harus dilakukan dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah mengenai pola ketahanan keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak, serta mendalami kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak pendidikan anak.

Dalam beberapa tulisan diatas, tampaknya belum ada pembahasan khusus mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dan Pelaksanaan Pola Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga. Dengan

¹⁶ Magdalena Heldiyana Ana Lalo “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Putus Sekolah Atas Pendidikan.” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2016.

lokasi yakni di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penelitian yang dipilih juga berbeda dengan struktur sosial masyarakat yang berbeda pula. Hal ini menunjukkan bahwa orisinalitas dari penelitian penyusun ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teoretik

1. Hadhanah

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua. Anak yang masih kecil (belum mumayyiz) harus dirawat dan dididik dengan baik, karena apabila tidak diperlakukan dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak mereka. Pemeliharaan anak hadhanah bertujuan untuk membantu anak memenuhi kebutuhannya karena belum mampu melayani kebutuhannya sendiri.

يَايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نار او قودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد

لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون¹⁷

¹⁷ At-Tahrim (66): 6

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban Hadhanah, yakni bahwa orang tua dituntut untuk memelihara keluarganya termasuk anggota keluarga disini yakni anak agar terpelihara dari api neraka, agar supaya seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Untuk mengetahui mengenai perintah atau larangan yang diatur dalam agama maka kuncinya adalah pendidikan dan pengajaran agar bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan.

2. Pola Ketahanan Keluarga

Secara konstitusional perkawinan dinilai sebagai suatu hak sebagaimana terdapat pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Definisi perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ “Pernikahan merupakan sunatullah, bahwa

¹⁸ Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mahluk itu diciptakan berpasang-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan” (Q.S.Dzariyat (51):49)

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.¹⁹ Membentuk keluarga bertujuan untuk membentuk ketahanan keluarga yakni meningkatkan kualitas dasar untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat timbul rasa aman, tenteram agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu²⁰: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

¹⁹ Pasal 1 (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

²⁰ Pengembangan ketahanan keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, 2016, hlm. 7

Untuk mencapai tingkat ketahanan keluarga maka setidaknya ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu:²¹ (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

3. Hak Pendidikan Anak

UU No.1 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolok ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,

²¹ *Ibid.*, hlm 7

berada di bawah kekuasaan wali. Dari peraturan tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Keterbatasan itu yang membuat perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik, terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak²² Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

²² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm. 12

²³ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak mendapat jaminan dari konstitusi sebagai norma hukum tertinggi yakni dalam Pasal 28B UUD 1945 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa “Anak Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”²⁴ Pendidikan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Hak anak termasuk hak mendapatkan pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Urusan pendidikan juga merupakan salah satu upaya perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya

²⁴ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁵

Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya amanat nasional sebagai diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),²⁶ yaitu dengan melakukan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Pelaksanaan Pola Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak

²⁵ Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

²⁶ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2004), hlm.30.

Pendidikan Anak dalam Keluarga di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*,²⁷ yakni mendeskripsikan dan menganalisis keadaan dari objek yang diteliti secara langsung kepada narasumber dengan berdasarkan pada data primer sebagai data utamanya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif-yuridis,²⁸ yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Hukum Islam mengenai Hak Anak dalam Keluarga.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Bahan Hukum Primer,³⁰ yaitu data diperoleh oleh penyusun dari hasil penelitian di lapangan dengan meninjau secara langsung objek yang diteliti, dan hasil wawancara dengan narasumber.

²⁷ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.38.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 19.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

³⁰ *Ibid.*

- b. Bahan Hukum Sekunder,³¹ berupa norma-norma atau kaedah-kaedah dasar seperti UUD RI 1945, peraturan perundang-undangan.
- c. Bahan Hukum Tersier,³² yaitu penelitian serta jurnal yang diperoleh dari media cetak maupun internet, serta sumber-sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis tentang Pola Ketahanan Keluarga dan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak serta hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier merupakan salah satu sumber hukum yang memberikan penjelasan tambahan setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*,³³ karena penyusun hendak meneliti unsur-unsur yang masuk di dalam pola ketahanan keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Untuk itu, informasi didapat dari lima keluarga yang memiliki anak di Padukuhan Ambarukmo Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Walaupun sama-sama memiliki anak tapi ada beberapa perbedaan diantara kelimanya terutama mengenai pekerjaan dan

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2016) hlm. 85.

kondisi keluarga yang tentu berbeda pula dalam penerapan pola asuh dalam pemenuhan pendidikan. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti/penulis. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁴

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.³⁵ Dalam hal ini penulis mengamati obyek dari penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga.
- b. Dokumentasi³⁶ yaitu cara memperoleh tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan hal tersebut.
- c. Wawancara³⁷ akan ditujukan kepada suatu keluarga dalam lingkungan masyarakat untuk memperoleh data dari narasumber guna memperoleh keterangan dan mengetahui informasi serta tanggapan dari narasumber.

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 91.

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

³⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

³⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 59.

Wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan informasi berupa keterangan dan pernyataan seputar permasalahan yang diteliti, yaitu memperoleh data tentang Bagaimana Pelaksanaan Pola Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga.

7. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian menggunakan analisis kualitatif³⁸, yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti. Selain itu juga memakai metode berfikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian ini, maka perlu uraian sementara menyangkut urutan bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah tentang pelaksanaan pola ketahanan keluarga dalam pemenuhan hak

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 21.

pendidikan di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskan suatu pokok masalah yang wajib dijawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat diadakan penelitian karena setiap penelitian akan dipertanyakan kontribusinya. Setelah itu, telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis lain yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dilanjutkan dengan kerangka teori yakni mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara pendekatan dan langkah langkah yang dilakukan. Yang terakhir adalah sistematika penulisan skripsi dibuat untuk memberikan gambaran umum secara sistematis dan logis mengenai kerangka bahasan penelitian.

Pada bab kedua, mengulas mengenai gambaran umum tentang hadhanah, kemudian dilanjutkan ketahanan keluarga dan hak pendidikan anak. Hal ini perlu dikemukakan meskipun secara umum, sebab gambaran umum ini merupakan pintu masuk dalam bahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya.

Pada bab ketiga, berisi gambaran umum letak geografis dan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Selanjutnya dijabarkan mengenai praktik pola asuh orang tua dalam pemenuhan pendidikan anak

sebagai hal pokok yang dianalisis. Hal ini diperlukan guna mendukung analisis dalam penelitian ini terhadap pelaksanaan pola ketahanan keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Pada bab keempat, analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pola Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dalam hal ini informasi didapat dari lima keluarga, yang terlibat dalam pendidikan anak di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Pada bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun secara singkat, padat dan jelas mencakup jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pola ketahanan keluarga di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Orang tua setidaknya memiliki dua jalur dalam mendidik membina, membimbing, dan memberikan pendidikan terhadap anak sebagai bagian dari tanggung jawab hadanah terhadap anak. Jalur yang ditempuh yakni pendidikan pertama Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). TPA mempunyai suatu strategi mendidik anak-anak dengan Al-Qur'an, berupa pemahaman, penghayatan, pengamalan Al-Qur'an, pembinaan agama lebih diarahkan dalam membentuk dan membina peserta didik TPA untuk menghayati nilai-nilai agama. Jalur kedua pendidikan pada institusi sekolah. Sekolah dinilai memiliki sarana yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan anak terhadap ilmu pengetahuan dan penunjang lainnya dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Pada jalur ini faktor biaya terkadang menjadi kendala yang sering dihadapi oleh keluarga sehingga tidak semua anak mampu menyelesaikan jenjang pendidikan mewujudkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. faktor ekonomi,

pendidikan orang tua rendah, rumah tangga bermasalah, dan lain-lain juga menjadi bagian dari penyebab putusnya anak dalam menempuh pendidikan. Bagi anak yang putus sekolah, dapat berdampak kepada tujuan hidup di masa yang akan datang. Karena pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia Ia mudah dipengaruhi hal yang bersifat negatif dan yang lebih buruk dapat berbuat kejahatan yang tentunya tidak hanya merugikan anak saja tetap bagi keluarga dan lingkungan masyarakat.

2. Hasil analisis dalam Hukum Islam dapat disimpulakn bahwa tidak semua orang tua mampu menyelesaikan jenjang pendidikan anaknya mewujudkan program wajib belajar 12 (dua belas)

- a. Keluarga Bapak Yayan

Analisis pada keluarga Bapak Yayan sudah sesuai dengan pola ketahanan keluarga jika ditinjau dari hukum Islam karena Bapak Yayan sudah memenuhi hak pendidikan anaknya dengan baik.

- b. Bapak Wintoro

Berdasarkan analisis di atas keluarga Bapak Wintoro sudah sesuai dengan pola ketahanan keluarga jika ditinjau dari hukum Islam karena sudah memberikan Pendidikan kedisiplinan kepadanya anaknya.

c. Keluarga Bapak Santoso

Berdasarkan analisis di atas keluarga Bapak Santoso sudah sesuai dengan pola ketahanan keluarga jika ditinjau dari hukum Islam karena dia mendidik anaknya secara mandiri dan adil sesuai kebutuhan masing-masing.

d. Keluarga Ibu Sri

Berdasarkan analisis keluarga ibu Sri dapat dianggap sudah sesuai dengan pola ketahanan keluarga jika ditinjau dari hukum Islam karena dia mendidik anaknya sejak kecil. Namun jika dilihat secara menyeluruh termasuk pada pendidikan formal yang diprogram wajib 12 tahun hal ini dapat dianggap gagal karena Ibu Sri tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai jenjang 12 tahun.

e. Keluarga Bapak Slamet

Berdasarkan analisis pada keluarga Bapak Slamet sudah sesuai dengan pola ketahanan keluarga jika ditinjau dari hukum Islam dan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditetapkan di atas, maka saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah:

1. Orang tua harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya karena Hak mendapatkan pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin dan dilindungi oleh keluarga.
2. Orang tua harus mampu berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dalam membentuk dan membina anaknya. Orang tua juga harus mampu membangun ketahanan ekonomi Keluarga dalam rangka pembiayaan pendidikan agar anak tidak putus sekolah.
3. Bagi pemerintah diharapkan memberikan program penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan dan penyuluhan mengenai akses pendidikan yang bisa dijangkau.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama hendaknya mampu menggali lebih dalam peran lingkungan maupun pemerintah dalam upaya ketahanan keluarga dan kaitannya dengan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

2. Hadis

Anas Malik Ibn, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, sa

3. Fikih dan Ushul Fikih

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia dan Tafazza, 2009.

Halim, Abd, *Studi Hukum Perkawinan Kontemporer*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta : Academia dan Tafazza, 2013

Rosyadi, Ahmad “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Pespektif Hukum Islam dan Positif”, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016

Rahmawati, Ayu Nur “Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī'ah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Beberapa Keluarga Di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012

Amaliah, Nurul “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Di Bawah Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)”, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Muchtar, Heri Jauhari, *Fikih Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014

Siswadi, Imran, *Perlindungan Anak Dalam Perspektik Hukum Islam dan HAM, Al-Mawarid*, Volume XI, Nomor 2 September, 2011

4. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga

5. Kelompok Lain-Lain

Abdullah Sani, Ridwan dan Kadri, Muhammad, *Pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Faruqi, Isma'il Raji al-, *Tauhid*, (terjemah) Bandung: Penerbit Pustaka, 1988.

Nahlawi, Abd al-Rahmân al-, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, terjemahan oleh Sihabuddin, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Chadijah, Siti, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Rausyan Fikr*. Vol. 14 No. 1 Maret. 2018.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004.
- Darajat, Zakiyah, Berawal dari Keluarga:Revolusi Belajar Cara al-Qur'an, Jakarta, Hikmah, cetakan ke-1, 2002.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hafsah, Kajian Perlindungan Hak Pendidikan Dan Agama Anak Dalam Keluarga Muslim Di Kota Medan, *Ahkam*, Volume, xvi, no. 2, Juli, 2016.
- Hasballah, Fachruddin, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007.
- Lestari, S. dan Ngatini, *Pendidikan Islam Kontekstual*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2010.
- Magdalena Heldiyana Ana Lalo "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Putus Sekolah Atas Pendidikan." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2016.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kencana Predana Media, 2005.
- Musfidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press. 2013.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Pengembangan Ketahanan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Rizqi Maulida Amalia, dkk, Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian, *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2, September, 2017.
- Roqib, Moh, *Menggugat fungsi Edukasi Masjid*, Yogyakarta: Grafindi Litera Media, 2005.

Rusn, Abidin, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Wilis, Sofyan S, *Konseling Keluarga: Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*, cet. ke-1 Bandung: Alfabeta, 2009.